

INTISARI

Aturan *sĪma* merupakan salah satu unsur terpenting dalam prasasti. Raja dan pejabat memiliki hak untuk menetapkan aturan di tanah *sĪma* yang ditetapkan oleh mereka. Untuk memastikan aturan yang mereka tetapkan dipatuhi oleh seluruh golongan masyarakat, raja dan pejabat kerajaan mencantumkan *sapatha* di dalam prasasti sebagai bentuk wewenang mereka. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbedaan hak dan wewenang yang dimiliki oleh raja dan pejabat kerajaan dalam kedua aspek tersebut pada masa pemerintahan Dyah Balitum dan pada masa pemerintahan Mpu Siḥok. Penelitian ini terdiri dari lima langkah, yaitu heuristik, kritik sumber, analisis, interpretasi, dan penulisan sejarah. Edisi dan terjemahan prasasti pertama dikumpulkan lalu diseleksi berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Prasasti tersebut kemudian dikategorikan berdasarkan pemberi *sĪma* lalu dipetakan aturan *sĪma* serta *sapatha* di setiap prasasti. Lalu hasil dari analisis tersebut diinterpretasikan dan dirangkai menjadi narasi sejarah. Hasil penelitian menunjukkan terdapat distribusi hak dalam penetapan aturan *sĪma* pada masa Balitum. Namun, memasuki masa pemerintahan Mpu Siḥok hak tersebut hanya dimiliki oleh raja. Sementara itu, penggunaan *sapatha* sangat dipengaruhi oleh dinamika kerajaan, dinamika kerajaan yang berkejolak pada akhir masa pemerintahan Balitum membuat *sapatha* pada masa tersebut lebih detail dan komprehensif.

ABSTRACT

SĪma regulations are an essential part of a *sĪma* charter. A king or a dignitary has a right to regulate the activity in the *sĪma* which they established. In order to made that said regulation respected by the people, a king or dignitary may insert a *sapatha* in the charter as a form of their authority. This research aims to see the difference of rights and authority between king and dignitary in regulating a *sĪma* that they established and the *sapatha* they employed. This research consisted of five steps: heuristic, source criticism, analysis, interpretation, and historiography. The first step, heuristic, involves gathering edition and translation of Old Javanese inscriptions through literature study. The edition and translation of the inscriptions is further selected based on a set of conditions. The inscriptions that fulfill the conditions are then categorized, first on the base of the time of issuance, then based on the rank of the issuer. The research found that during the reign of Dyah Balitum, there was a distribution of rights between king and dignitaries. However, during the reign of Mpu Sindok the right to regulate and establish a *sĪma* was concentrated in the hand of the king. As for the *sapatha*, their utilization was heavily influenced by the stability of the state.